



**KERJASAMA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DENGAN AMERIKA SERIKAT
(DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATIVE) DALAM MENGUNGKAP KASUS
NARKOBA JARINGAN IRAN-PAKISTAN**

Oleh
Ahmad Faisal Pristianto
Universitas Paramadina
Email: ahmad.pristianto@students.paramadina.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan narkoba internasional menjadi ancaman serius bagi keamanan global, termasuk di Indonesia. Salah satu jaringan yang memiliki operasi lintas negara adalah sindikat narkoba Iran-Pakistan. Dalam upaya memberantas jaringan ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bekerja sama dengan Drug Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerja sama yang telah terjalin antara Bareskrim Polri dan DEA dalam mengungkap kasus narkoba jaringan Iran-Pakistan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis tematik dengan pendekatan kualitatif, melalui kajian dokumen dan sumber-sumber sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Bareskrim Polri dan DEA melibatkan pertukaran informasi intelijen, operasi gabungan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas personel dalam memberantas peredaran narkoba lintas negara. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan, seperti perbedaan regulasi hukum, kendala diplomatik, serta kompleksitas jaringan narkoba yang terus beradaptasi terhadap pola pemberantasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kerja sama internasional, terutama antara Bareskrim Polri dan DEA, memiliki potensi besar dalam memperkuat upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penyelarasan kebijakan, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta penguatan aspek diplomasi keamanan dalam menangani kasus-kasus lintas negara.

Kata Kunci: *Kerja Sama Internasional, Bareskrim Polri, DEA, Narkoba, Iran-Pakistan, Pemberantasan Kejahatan Transnasional.*

PENDAHULUAN

Perdagangan narkoba internasional telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keamanan global dalam beberapa dekade terakhir. Jaringan kriminal transnasional memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum dan penegakan hukum di berbagai negara untuk memfasilitasi peredaran zat terlarang. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), perdagangan narkoba menghasilkan miliaran dolar setiap tahun, yang kemudian digunakan untuk mendanai aktivitas ilegal lainnya, termasuk terorisme dan

perdagangan manusia (UNODC, 2020). Indonesia, dengan letak geografisnya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, telah menjadi titik transit utama bagi perdagangan narkoba internasional. Kombinasi antara garis pantai yang panjang dan ribuan pulau membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Selain itu, permintaan domestik yang signifikan terhadap narkoba semakin memperumit upaya pemberantasan peredaran gelap ini (Andreas, 2019). Salah satu jaringan



yang paling menonjol dalam perdagangan narkoba di Indonesia adalah sindikat yang berasal dari Iran dan Pakistan. Jaringan ini dikenal memiliki struktur organisasi yang kompleks dan metode penyelundupan yang canggih, termasuk penggunaan kapal nelayan, kontainer kargo, dan kurir manusia. Studi oleh Ahmadov (2021) dan Prayuda et al. (2020) menunjukkan bahwa sindikat ini memanfaatkan hubungan historis dan budaya antara negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara untuk memfasilitasi operasi mereka.

Untuk menghadapi ancaman ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih, yang bertujuan untuk menangani kasus-kasus kejahatan transnasional, termasuk perdagangan narkoba. Satgasus ini dilengkapi dengan sumber daya dan wewenang khusus untuk melakukan operasi penegakan hukum yang lebih efektif (Suhartanto, 2023). Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba, Polri menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga penegak hukum internasional, salah satunya adalah *Drug Enforcement Administration* (DEA) dari Amerika Serikat. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan operasi gabungan untuk mengungkap dan membongkar jaringan narkoba internasional (Cahyani et al., 2023; Tataru et al., 2023). Namun, kerjasama internasional dalam penegakan hukum tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan dalam sistem hukum, budaya, dan prioritas nasional seringkali menjadi hambatan dalam implementasi kerjasama yang efektif. Menurut Andreas (2019), Gerspacher (2008) dan Prayuda (2020), meskipun ada kesepakatan umum tentang bahaya perdagangan narkoba, pendekatan yang berbeda terhadap penegakan hukum dapat menghambat upaya kolaboratif.

Dalam konteks Indonesia, kerjasama dengan DEA menghadapi tantangan tambahan, termasuk isu kedaulatan nasional dan sensitivitas terhadap intervensi asing. Menurut

studi oleh Martin 2021 dan Raja Gukguk (2019) meskipun kerjasama internasional dianggap penting, ada kekhawatiran bahwa keterlibatan lembaga asing dalam penegakan hukum domestik dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Meskipun demikian, kerjasama antara Polri dan DEA telah menghasilkan beberapa keberhasilan signifikan. Sebagai contoh, operasi gabungan pada tahun 2019 berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkoba yang melibatkan sindikat Iran-Pakistan, dengan barang bukti berupa ratusan kilogram metamfetamin yang disita. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa, meskipun ada tantangan, kerjasama internasional dalam penegakan hukum dapat memberikan hasil yang positif. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerjasama ini, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika, tantangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi antara Polri dan DEA.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerjasama antara Badan Reserse Kriminal Polri dan DEA dalam mengungkap kasus narkoba jaringan Iran-Pakistan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan mengevaluasi efektivitas kerjasama tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi kejahatan terorganisir transnasional.

Peredaran narkoba internasional merupakan salah satu ancaman serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Jaringan narkoba transnasional, seperti yang berasal dari Iran dan Pakistan, telah menunjukkan pola operasi yang kompleks dan sulit dideteksi, mengingat mereka memanfaatkan jalur distribusi lintas negara yang terorganisir dengan baik. Untuk menanggulangi ancaman ini, diperlukan upaya kerja sama internasional yang kuat, salah satunya melalui kolaborasi antara Bareskrim



Polri dengan *Drug Enforcement Administration* (DEA) Amerika Serikat. Namun, meskipun kerja sama ini telah terjalin, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, baik dari segi teknis, hukum, maupun operasional.

Salah satu permasalahan utama yang perlu diidentifikasi adalah Mengeksplorasi kerja sama antara Satgasus Merah Putih dan DEA. Kerja sama ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pertukaran intelijen, strategi penindakan, serta koordinasi antar lembaga dalam memberantas sindikat narkoba internasional. Selain itu, penting untuk Mengembangkan rekomendasi model kerja sama yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba jaringan Iran-Pakistan. Dengan memahami secara mendalam bentuk kerja sama dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kerja sama internasional dalam pemberantasan narkoba, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan sinergi antara kedua lembaga penegak hukum tersebut.

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah dilakukan untuk memastikan fokus kajian yang lebih terarah dan mendalam terhadap kerja sama antara Bareskrim Polri dan *Drug Enforcement Administration* (DEA) Amerika Serikat dalam mengungkap kasus narkoba jaringan Iran-Pakistan. Penelitian ini hanya akan membahas bentuk kerja sama yang telah dijalin antara kedua lembaga tersebut, mencakup mekanisme pertukaran intelijen, koordinasi investigasi, serta strategi operasional dalam memberantas jaringan narkoba lintas negara.

Selain itu, penelitian ini akan membatasi pembahasan pada tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerja sama tersebut, baik dari aspek hukum, teknis, maupun koordinatif. Faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kebijakan narkoba secara umum, peran lembaga lain di luar Bareskrim

Polri dan DEA, serta aspek sosial-ekonomi dari peredaran narkoba jaringan Iran-Pakistan tidak akan menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan adanya pembatasan masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih spesifik dan mendalam mengenai efektivitas kerja sama antara kedua lembaga dalam menangani kejahatan narkoba transnasional. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sBagaimana pendekatan kerjasama internasional dalam penanganan jaringan narkoba iran-pakistan? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran pendekatan kerjasama internasional dalam penanganan jaringan narkoba iran-pakistan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena kerjasama antara Polri dan *Drug Enforcement Administration* (DEA) dalam pemberantasan narkoba internasional. Metode studi kasus dipilih karena mampu mengungkap bagaimana dan mengapa fenomena terjadi serta memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap dinamika hukum, budaya organisasi, logistik, dan politik internasional dalam kerjasama ini. Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi antar aktor, memahami pola kerjasama, serta mengevaluasi dampak dari tindakan-tindakan tertentu dalam konteks spesifik. Selain itu, penelitian ini menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen resmi, laporan operasi, dan observasi langsung, dengan menerapkan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan (Yin, 2018). Pendekatan ini juga membantu mengungkap hubungan kausal dalam kerjasama internasional, termasuk pengaruh budaya organisasi, regulasi hukum internasional, dan teknologi komunikasi terhadap efektivitas operasional. Konteks geopolitik dan perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat turut menjadi faktor yang memengaruhi strategi dalam



operasi bersama, sehingga analisis ini tidak hanya memberikan wawasan lokal tetapi juga dapat berkontribusi pada teori yang lebih luas mengenai kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan (Stake, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan konsumsi opium di wilayah Jalur Persia selama satu abad terakhir merupakan fenomena penting dalam sejarah perdagangan dan penggunaan narkotika. Jalur Persia, yang secara historis menjadi rute utama distribusi opium, mengalami dinamika signifikan dalam pola konsumsi dan jumlah pengguna dari tahun 1907–1908 hingga tahun 2006.

Laporan *A Century of International Drug Control* yang diterbitkan oleh UNODC memberikan gambaran kuantitatif yang membantu memahami dampak kebijakan serta tren konsumsi opium di sepanjang Jalur Persia. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan antara periode 1907–1908 dan tahun 2006 dalam konteks konsumsi opium dan dinamika penggunaannya.

Menurut Laporan UNODC dalam *A Century of International Drug Control* dijelaskan bahwa Produksi opium di Persia telah berlangsung sejak 900 SM dan berkembang menjadi pusat utama dalam perdagangan opium global. Selama berabad-abad, opium diproduksi untuk keperluan medis dan perdagangan. Namun, dengan perkembangan perdagangan internasional pada abad ke-19, opium Persia menjadi bagian penting dari rute perdagangan global yang melibatkan kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa.

Pada awal abad ke-20, upaya pengendalian narkotika mulai dilakukan melalui konvensi internasional. Produksi opium di Persia mengalami penurunan signifikan seiring dengan meningkatnya regulasi perdagangan narkoba. Upaya ini merupakan bagian dari sistem pengendalian internasional yang disepakati melalui Konvensi Opium Den Haag (1912), serta didukung oleh PBB setelah

Perang Dunia II. Saat ini, Iran berperan sebagai negara kunci dalam upaya penegakan hukum anti-narkotika, khususnya dalam menangani penyelundupan dari Afghanistan, yang merupakan produsen opium terbesar di dunia.

Perdagangan narkoba menjadi tantangan besar bagi Republik Islam Iran. Letak geografisnya, dengan perbatasan timur sepanjang 1.923 km yang berpori dengan Afghanistan penghasil opium terbesar di dunia dan Pakistan, menjadikan Iran jalur transit utama narkoba. Pada 2012, Iran bertanggung jawab atas 74% penyitaan opium dunia serta 25% heroin dan morfin. Selama tiga dekade terakhir, lebih dari 3.700 petugas penegak hukum tewas dalam operasi anti-narkotika. Tantangan baru termasuk produksi metamfetamin (dikenal sebagai "Shisheh") dan peningkatan penyelundupan melalui jalur maritim. UNODC mendukung Iran dalam manajemen perbatasan dan upaya penanggulangan narkoba melalui berbagai inisiatif.

Jaringan narkotika Iran-Pakistan merupakan salah satu jaringan peredaran narkoba terbesar di Asia Barat dan Asia Selatan saat ini yang berbatasan langsung dengan Afghanistan, produsen opium terbesar di dunia. Kompleksitas geografis serta lemahnya pengawasan di sejumlah titik perbatasan telah menciptakan celah bagi jaringan kriminal untuk berkembang pesat (UNODC, 2021). Rute ini telah menjadi jalur utama perdagangan heroin dan metamfetamin menuju berbagai wilayah, termasuk Eropa, Asia Tenggara, dan Australia.

Afghanistan telah menjadi pusat produksi opium dunia selama beberapa dekade. Sejak awal 2000-an, produksi opium di negara ini terus meningkat akibat ketidakstabilan politik dan konflik yang berkepanjangan. Opium mentah dari Afghanistan diolah menjadi heroin, yang kemudian diselundupkan melalui Iran dan Pakistan untuk didistribusikan ke pasar internasional (UNODC, 2021). Laporan UNODC menunjukkan bahwa 80% heroin yang



beredar di Eropa berasal dari jalur Iran-Pakistan.

Balochistan, sebuah provinsi di barat daya Pakistan, menjadi titik transit utama dalam jaringan ini. Wilayah ini memiliki rute yang sulit dijangkau, seperti pegunungan dan gurun yang luas, yang dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk menghindari pantauan aparat keamanan (Gul, 2018). Kota Quetta di Balochistan sering digunakan sebagai pusat logistik sebelum narkoba dikirim ke pelabuhan Karachi dan Gwadar, untuk selanjutnya didistribusikan ke pasar internasional (Ahmed, 2020).

Iran memegang peran penting dalam jaringan narkoba ini sebagai jalur utama menuju Timur Tengah dan Eropa. Para penyelundup sering menggunakan wilayah perbatasan seperti Sistan dan Baluchestan sebagai jalur utama untuk menyelundupkan heroin. Meski pemerintah Iran telah berupaya keras meningkatkan patroli di wilayah perbatasan, panjangnya perbatasan serta keterbatasan sumber daya tetap menjadi kendala (Farzin, 2019).

Jaringan narkoba Iran-Pakistan dioperasikan oleh berbagai kelompok kriminal terorganisir yang memiliki struktur rapi dan koneksi luas hingga ke Eropa dan Asia Tenggara. Kelompok-kelompok ini bekerja sama dengan jaringan internasional lainnya untuk memperluas distribusi dan mengamankan rute perdagangan mereka. Selain itu, mereka menggunakan hasil perdagangan narkoba untuk membiayai aktivitas ilegal lainnya, seperti penyelundupan senjata dan pendanaan organisasi kriminal (UNODC, 2021).

Peredaran narkoba dari jaringan ini telah membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di negara-negara asal seperti Iran dan Pakistan. Di kedua negara ini, banyak komunitas lokal yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat keterlibatan dalam aktivitas perdagangan narkoba (Farzin, 2019). Jumlah pengguna narkoba di kawasan tersebut juga

terus meningkat, menyebabkan krisis kesehatan masyarakat yang serius. Pemerintah Pakistan, misalnya, melaporkan lonjakan jumlah pengguna heroin dalam lima tahun terakhir (Ahmed, 2020).

Kerja sama internasional menjadi elemen kunci dalam upaya penanggulangan jaringan narkoba Iran-Pakistan. Badan PBB seperti UNODC memainkan peran penting dalam memberikan pelatihan serta bantuan teknis kepada aparat penegak hukum di Iran dan Pakistan (UNODC, 2021). Selain itu, negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat terus memperkuat kerja sama intelijen untuk mencegah masuknya narkoba dari jalur Iran-Pakistan.

Peredaran narkoba internasional merupakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jaringan narkoba Iran-Pakistan telah lama dikenal sebagai sindikat terbesar dalam penyelundupan narkoba ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk menangani ancaman ini, Bareskrim Polri bekerja sama dengan *Drug Enforcement Administration* (DEA) dari Amerika Serikat guna memperkuat strategi dalam mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan transnasional ini.

Sindikatan narkoba Iran-Pakistan telah beroperasi selama bertahun-tahun menggunakan berbagai modus penyelundupan yang semakin canggih. Salah satu metode yang sering digunakan adalah melalui jalur laut dengan sistem ship to ship, di mana narkoba dari Iran dipindahkan ke kapal lain di tengah laut sebelum akhirnya dibawa masuk ke Indonesia. Selain itu, jaringan ini juga memanfaatkan perusahaan fiktif untuk menyamarkan transaksi narkoba. Bareskrim Polri memiliki peran krusial dalam memutus rantai peredaran narkoba di Indonesia. Melalui kerja sama dengan berbagai instansi internasional, termasuk DEA, Polri berupaya mengidentifikasi dan menindak para pelaku kejahatan narkoba lintas negara. Keberhasilan dalam pengungkapan berbagai kasus besar

menunjukkan bahwa Polri terus memperkuat upaya dalam menangani sindikat narkoba skala global.

Salah satu kasus terbesar yang berhasil diungkap adalah penyelundupan 402,38 kilogram sabu-sabu oleh jaringan Iran-Pakistan pada Juni 2020. Dalam operasi ini, Satgasus Merah Putih berhasil menangkap tujuh tersangka yang terdiri dari empat warga negara asing (Iran dan Pakistan) serta tiga warga negara Indonesia. Barang bukti tersebut ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat.



Gambar 1 402,38 kg "shabu-shabu" di Sukabumi berasal dari Timur Tengah

Sumber: ANTARANEWS.COM

Dalam operasinya, sindikat ini menggunakan berbagai modus untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Salah satunya adalah dengan mendirikan perusahaan fiktif yang bergerak di bidang impor makanan. PT AMS, misalnya, digunakan sebagai kedok untuk mengimpor kurma dan pinang, padahal perusahaan ini sebenarnya dijadikan alat untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Sindikat ini mengandalkan jalur laut sebagai rute utama penyelundupan narkoba ke Indonesia. Mereka menggunakan sistem ship to ship, di mana kapal dari Iran membawa narkoba dalam jumlah besar dan mentransferkannya ke kapal lain di tengah laut. Setelah itu, barang haram tersebut dibawa ke darat melalui pantai-pantai terpencil di Jawa

Barat dan wilayah pesisir lainnya. Untuk menanggulangi peredaran narkoba internasional, Polri menerapkan strategi keamanan yang melibatkan pemantauan ketat di perbatasan maritim, pengawasan terhadap perusahaan yang dicurigai, serta kerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti DEA dan Interpol.



Gambar 2 Satgasus Polri tangkap tujuh pengedar narkoba jaringan Iran-Pakistan

Sumber: ANTARANEWS.COM

DEA berperan dalam menyediakan informasi intelijen mengenai pergerakan jaringan narkoba Iran-Pakistan. Informasi ini sangat penting bagi Polri untuk mengidentifikasi jalur distribusi, metode penyelundupan, serta aktor-aktor utama dalam sindikat ini. Setelah berhasil menangkap tujuh tersangka dalam kasus penyelundupan 402,38 kilogram sabu-sabu di Sukabumi, Polri segera memproses mereka melalui jalur hukum. Para tersangka dihadapkan pada berbagai pasal dalam Undang-Undang Narkotika Indonesia dengan ancaman hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati bagi pelaku utama. Selain terlibat dalam penyelundupan narkoba, sindikat Iran-Pakistan juga melakukan tindak pidana pencucian uang. PT AMS diduga bekerja sama dengan PT Global Auto Trans dalam ekspor motor ke Iran sebagai cara untuk menyamarkan hasil transaksi narkoba. Tercatat transaksi sebesar Rp15 miliar yang diduga berasal dari hasil perdagangan narkoba.



**Gambar 3 Satgasus Polri – DEA
Mengungkap Jaringan Narkoba Internasional**

Sumber: ANTARANEWS.COM

Polres Metro Jakarta Barat bekerja sama dengan *Drug Enforcement Administration* (DEA) Amerika Serikat pada tahun 2021 untuk mengungkap jaringan narkoba internasional asal Iran di perumahan mewah Taman Cendana Golf, Karawaci, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat investigasi, berbagi informasi, dan mempersempit ruang gerak jaringan narkoba internasional yang beroperasi di wilayah Indonesia. Jaringan Iran diketahui sebagai salah satu pemasok narkoba jenis sabu ke Indonesia. Dalam operasi tersebut, DEA juga memberikan pelatihan serta transfer pengetahuan kepada Polres Metro Jakarta Barat guna meningkatkan kapasitas penanganan kasus narkotika internasional.

Smart Power Dalam Kerja Sama Internasional

Konsep **Smart Power** yang diperkenalkan oleh Joseph S. Nye menekankan pentingnya kombinasi **Hard Power** dan **Soft Power** dalam kerja sama internasional. Hard power dalam kerja sama ini diwujudkan melalui operasi gabungan yang berhasil mengungkap penyelundupan **402,38 kg sabu-sabu di Sukabumi (2020)** dan operasi di **Taman**

Cendana Golf, Tangerang (2021). Selain itu, tindakan hukum terhadap para tersangka, termasuk penyitaan aset dan ancaman hukuman mati bagi pelaku utama, mencerminkan upaya koersif dalam pemberantasan kejahatan transnasional.

Teknologi pemantauan canggih dan strategi **ship to ship interdiction** juga menjadi bagian dari pendekatan ini untuk menghambat jalur distribusi narkoba. Polri dan DEA memanfaatkan teknologi intelijen dalam mengidentifikasi serta memutus jalur peredaran narkoba, dengan memantau pergerakan kapal yang dicurigai membawa barang haram tersebut. Strategi ini memungkinkan tindakan cepat untuk mencegah narkotika masuk ke Indonesia. Di sisi lain, soft power diterapkan melalui bantuan intelijen dan pelatihan yang diberikan DEA kepada Polri, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyidik dalam menangani kejahatan narkotika lintas negara. Pelatihan ini mencakup teknik investigasi canggih, pemanfaatan teknologi digital dalam pelacakan transaksi keuangan ilegal, serta koordinasi lintas negara dalam pengungkapan jaringan narkoba.

Program pertukaran informasi dan **transfer pengetahuan** juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas investigasi narkoba internasional. DEA memberikan akses kepada Polri terhadap jaringan data global terkait organisasi narkotika, sehingga memungkinkan identifikasi lebih cepat terhadap sindikat yang terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga seperti **Interpol** dan **lembaga anti-narkoba lainnya** menunjukkan pendekatan diplomasi dalam pemberantasan narkotika. Keterlibatan organisasi internasional ini memperkuat kerja sama dalam melacak jalur peredaran narkoba yang melewati berbagai negara sebelum mencapai Indonesia. Kerja sama antara Polri dan DEA juga melibatkan upaya diplomasi hukum dalam memastikan adanya mekanisme ekstradisi bagi tersangka yang ditangkap di luar



.....
negeri. Dalam beberapa kasus, tersangka utama jaringan Iran-Pakistan ditangkap di negara ketiga, dan kerja sama hukum antara berbagai negara menjadi kunci dalam memastikan mereka diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penerapan Smart Power dalam kerja sama Polri – DEA membuktikan bahwa keberhasilan dalam menangani kejahatan transnasional tidak hanya bergantung pada kekuatan represif, tetapi juga strategi kolaboratif dan preventif. Strategi yang mengombinasikan pendekatan koersif dan non-koersif ini memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman narkoba global. Dengan sinergi yang kuat antara kedua belah pihak, upaya pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara lebih efektif, serta mencegah jaringan narkoba global menjadikan Indonesia sebagai target utama perdagangan narkoba.

Teori Kedaulatan dan Perbatasan dalam Penegakan Hukum Global

Menurut Christopher Rudolph, kedaulatan negara dalam era globalisasi semakin bersifat **interdependen**, di mana negara harus berbagi aspek kedaulatan tertentu untuk efektivitas penegakan hukum. Interdependensi kedaulatan terlihat dari kerja sama erat antara Polri dan DEA dalam berbagi data intelijen serta melakukan operasi gabungan dalam memberantas jaringan narkoba Iran-Pakistan. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber memungkinkan identifikasi yang lebih akurat terhadap jalur distribusi narkoba serta pola operasi sindikat narkoba lintas negara. Pemantauan perbatasan maritim yang lebih ketat menjadi bagian dari strategi pertukaran informasi guna mengidentifikasi jalur penyelundupan narkoba. Kerja sama ini mencakup pengawasan terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba melalui jalur laut dengan metode ship to ship, yang kerap digunakan oleh jaringan Iran-Pakistan untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum.

Selain pemantauan perbatasan laut, sistem keamanan di darat juga diperkuat melalui pengawasan terhadap perusahaan yang dicurigai sebagai bagian dari sindikat penyelundupan narkoba. Modus yang digunakan sering kali melibatkan perusahaan fiktif yang mengimpor barang legal seperti makanan atau komoditas lain untuk menyamarkan transaksi narkoba.

Konsep pertukaran kedaulatan tercermin dalam perjanjian ekstradisi yang mempercepat proses hukum terhadap tersangka narkoba lintas negara. Indonesia dan AS berbagi informasi sensitif untuk memastikan bahwa tersangka yang ditangkap di kedua negara dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbatasan negara tetap menjadi faktor penting dalam penegakan hukum, tetapi fleksibilitas dalam pengawasan lintas batas diperlukan untuk menghadapi kejahatan transnasional. Hal ini mencerminkan realitas bahwa sindikat narkoba tidak mengenal batas negara dan memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum untuk beroperasi dengan lebih leluasa.

Pengawasan terhadap perusahaan yang dicurigai terlibat dalam penyelundupan narkoba menjadi salah satu strategi utama dalam kerja sama ini. Polri dan DEA melakukan investigasi mendalam terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan untuk mengidentifikasi dan membongkar jaringan yang terlibat. Selain operasi penindakan, kerja sama ini juga mencakup pelatihan bagi personel penegak hukum di Indonesia agar lebih siap menghadapi ancaman narkoba lintas negara. DEA berkontribusi dalam memberikan transfer pengetahuan terkait metode investigasi canggih dan teknologi pengawasan terbaru.

Hubungan erat antara Polri dan DEA dalam pertukaran intelijen memungkinkan pencegahan dini terhadap penyelundupan narkoba. Dengan berbagi informasi secara cepat dan akurat, aparat dapat bertindak lebih proaktif dalam menghentikan aliran narkoba sebelum mencapai wilayah Indonesia.



Keberhasilan dalam membongkar jaringan narkoba Iran-Pakistan menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif dalam menangani kejahatan transnasional. Koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum serta harmonisasi kebijakan menjadi kunci dalam memastikan operasi berjalan dengan efisien. Dengan demikian, meskipun kedaulatan negara tetap penting, kerja sama internasional menjadi keharusan dalam meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan narkoba global. Dengan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan modus operandi sindikat narkoba, Polri dan DEA dapat memperkuat keamanan nasional dan mengurangi dampak peredaran narkoba di Indonesia.

Model *Two-Level Games* dalam Diplomasi Keamanan

Menurut Robert D. Putnam, kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh **dua level**, yaitu **level internasional** dan **level domestik**. Pada level internasional, kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pemberantasan narkoba diwujudkan melalui berbagai upaya koordinasi intelijen, operasi gabungan, serta strategi penindakan hukum yang lebih sistematis terhadap jaringan Iran-Pakistan. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan diplomasi keamanan yang melibatkan pertukaran informasi strategis untuk mengidentifikasi jalur distribusi narkoba dan aktor-aktor utama yang terlibat dalam sindikat kejahatan transnasional. Salah satu contoh nyata dari keberhasilan kerja sama ini adalah pengungkapan kasus **402,38 kg sabu-sabu di Sukabumi**, yang menjadi bukti efektivitas pertukaran intelijen dan kerja sama operasi antara kedua negara. Melalui koordinasi yang erat, Polri dan DEA dapat mendeteksi pola penyelundupan yang semakin kompleks dan beradaptasi dengan perubahan modus operandi yang digunakan oleh jaringan Iran-Pakistan.

Pada level domestik, Polri harus menyesuaikan strategi pemberantasan narkoba dengan regulasi hukum nasional dan dinamika

politik dalam negeri. Perubahan kebijakan yang terus berkembang mempengaruhi bagaimana Polri merancang pendekatan represif dan preventif dalam mengatasi peredaran narkoba. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi di Indonesia juga menjadi tantangan dalam menanggulangi dampak narkoba terhadap masyarakat. Sementara itu, DEA di Amerika Serikat menghadapi tantangan yang berbeda dalam menyeimbangkan kebijakan luar negeri dengan tekanan politik domestik. Opini publik di Amerika Serikat mengenai kebijakan perang melawan narkoba sering kali menjadi faktor yang memengaruhi alokasi sumber daya dan prioritas dalam memberantas jaringan internasional. Oleh karena itu, kerja sama dengan negara mitra seperti Indonesia menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat upaya global pemberantasan narkoba.

Pendekatan *Two-Level Games* yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama ini tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan internasional, tetapi juga oleh bagaimana masing-masing negara mengelola tantangan politik dan birokrasi domestiknya. Kebijakan yang diterapkan dalam negeri harus sejalan dengan kepentingan global agar kerja sama dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak hanya melibatkan lembaga penegak hukum, tetapi juga melibatkan aktor-aktor politik dan birokrasi di kedua negara. Kepentingan nasional, tekanan politik, dan aspek hukum menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan kerja sama ini dalam jangka panjang. Dengan adanya kerja sama yang lebih erat, Indonesia dan Amerika Serikat dapat memperkuat strategi kolektif dalam menangani jaringan narkoba internasional. Peran koordinasi lintas negara menjadi semakin penting mengingat sifat kejahatan narkoba yang terus berkembang dan semakin sulit dideteksi dengan metode tradisional.



Polri dan DEA juga terus mengembangkan strategi yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan baru dalam perang melawan narkoba. Hal ini mencakup pemanfaatan teknologi modern dalam investigasi, peningkatan kapasitas personel, serta pendekatan berbasis data dalam mengidentifikasi pola distribusi narkoba lintas negara. Dengan demikian, kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pemberantasan narkoba mencerminkan kompleksitas dari hubungan internasional yang tidak hanya berbasis pada penindakan hukum, tetapi juga pada diplomasi, strategi politik, serta sinergi antara kebijakan domestik dan internasional. Model *Two-Level Games* memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana kedua negara dapat terus memperkuat kolaborasi mereka di masa depan.

Model Kerja Sama Kepolisian Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional

Menurut studi Nadia Gerspacher, kerja sama kepolisian internasional berkembang menjadi model **bilateral dan multilateral** dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Kerja sama antara Polri dan DEA dalam pemberantasan jaringan narkoba Iran-Pakistan merupakan model kerja sama bilateral yang efektif. Kedua institusi memiliki hubungan koordinatif yang erat dalam berbagai aspek, mulai dari pertukaran intelijen, investigasi bersama, hingga penyesuaian kebijakan terkait pemberantasan narkoba. Salah satu bukti konkret dari efektivitas kerja sama ini adalah keberhasilan dalam mengungkap penyelundupan **402,38 kg sabu-sabu di Sukabumi** pada tahun 2020.

Dalam pertukaran intelijen, DEA memberikan akses kepada Polri terhadap teknologi pemantauan yang lebih maju, sementara Polri memanfaatkan jaringan intelijen lokal untuk mengidentifikasi dan menindak aktor-aktor utama dalam sindikat Iran-Pakistan. Teknologi ini memungkinkan pemantauan pergerakan narkoba secara real-

time serta membantu dalam memetakan jalur distribusi sindikat internasional. Investigasi bersama antara Polri dan DEA juga menjadi bagian penting dalam kerja sama ini. Melalui penyelidikan yang dilakukan secara terpadu, kedua pihak dapat mengungkap pola operasi sindikat narkoba lintas negara serta menindak pelaku yang terlibat, baik di tingkat perencanaan maupun eksekusi penyelundupan. Selain itu, harmonisasi hukum dan regulasi menjadi elemen krusial dalam memastikan kelancaran kerja sama bilateral ini. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi tantangan yang harus diselesaikan melalui koordinasi intensif agar tidak menghambat proses ekstradisi tersangka dan penyelesaian kasus secara hukum. Kesepakatan bilateral dalam hal ekstradisi telah membantu mempercepat proses hukum bagi pelaku kejahatan transnasional yang tertangkap di luar yurisdiksi masing-masing negara. Dengan adanya perjanjian ini, upaya pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa hambatan prosedural yang signifikan.

Di sisi lain, kerja sama ini juga melibatkan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi personel Polri. DEA secara aktif memberikan pelatihan dan seminar mengenai teknik investigasi terbaru, penggunaan teknologi dalam pemberantasan narkoba, serta strategi dalam membangun jaringan intelijen yang lebih luas. Efektivitas kerja sama ini tidak hanya tercermin dalam operasi penangkapan dan penyitaan narkoba, tetapi juga dalam langkah-langkah preventif yang diambil untuk mengurangi masuknya narkoba ke Indonesia. Dengan adanya peningkatan koordinasi dalam pemantauan perbatasan dan pelabuhan, upaya pencegahan dapat lebih optimal. Selain aspek teknis dan legal, diplomasi juga berperan penting dalam memastikan kerja sama ini berjalan dengan baik. Hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menjadi faktor pendukung utama dalam kelangsungan



kemitraan antara Polri dan DEA. Dalam menghadapi tantangan global terkait kejahatan narkoba, kerja sama Polri dan DEA membuktikan bahwa sinergi antara teknologi, regulasi, dan diplomasi merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Model kerja sama bilateral ini memberikan gambaran bagaimana kolaborasi lintas negara dapat menjadi solusi dalam memberantas jaringan narkoba skala internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Bareskrim Polri dan DEA dalam pemberantasan jaringan narkoba Iran-Pakistan merupakan contoh nyata dari sinergi antarnegara dalam menghadapi kejahatan transnasional. Penerapan pendekatan Smart Power dalam kerja sama ini menunjukkan bagaimana kombinasi strategi koersif dan diplomasi dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Polri dan DEA tidak hanya mengandalkan operasi represif, tetapi juga mengoptimalkan pertukaran intelijen, pelatihan bersama, dan penguatan regulasi dalam upaya menekan peredaran narkoba lintas negara.

Dalam aspek kedaulatan dan perbatasan, kerja sama ini membuktikan bahwa negara-negara harus menyesuaikan kebijakan domestik mereka dengan dinamika global. Fleksibilitas dalam pengawasan perbatasan dan harmonisasi kebijakan ekstradisi menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum terhadap sindikat narkoba. Selain itu, penerapan Model Two-Level Games dalam diplomasi keamanan menegaskan bahwa efektivitas kerja sama tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan antarnegara, tetapi juga oleh bagaimana masing-masing negara mengelola faktor politik dan birokrasi internalnya.

Lebih lanjut, model kerja sama kepolisian internasional yang diterapkan dalam kolaborasi antara Polri dan DEA menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi hukum, pemanfaatan teknologi, dan strategi koordinatif dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam

menanggulangi kejahatan narkoba. Dengan adanya integrasi strategi ini, upaya pemberantasan narkoba dapat lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan secara unilateral oleh satu negara, melainkan memerlukan koordinasi yang erat dalam berbagai aspek, baik operasional, regulatif, maupun diplomasi internasional. Keberhasilan kerja sama antara Polri dan DEA menjadi model yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menghadapi ancaman narkoba global. Oleh karena itu, penelitian mendatang diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam aspek-aspek spesifik yang dapat meningkatkan efektivitas kerja sama ini, baik dalam bidang hukum, teknologi, maupun pendekatan sosial dalam pencegahan narkoba.

REFERENSI

- [1] Ahmadov, I. (2021). Islamic Revolutionary Guards and the Problem of Drug Trafficking in Iran. *Politicon*, March 2007.
- [2] Ahngari Nanekaran, Z., Mirkhalili, S. M., Hashemi, S. H., & Sheydaei, M. (2021). Preventing Drug Demand in Criminal Policy: A Comparison of Educational Strategies in Britain, Iran and the United States. *Iranian Journal of Comparative Education*, 4(4), 1497–1519. <https://doi.org/10.22034/IJCE.2021.255423.1235>
- [3] Ais, A., Jodhi Kurniawan, & Nabilah Farah Dibah. (2021). Peranan Ncb-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkoba Antar Lintas Batas Negara (Observation Case At Indonesian National Police Headquarters). *Journal Equitable*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2682>
- [4] Andreas, P. (2019). Drugs and war: What is the relationship? *Annual Review of Political Science*, 22, 57–73.



- <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051017-103748>
- [5] Bandung Hermeni; Hanura, Marten, B. A. S. (2016). Efektivitas Kerja Sama Indonesia - Tiongkok Dalam Upaya Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba Di Wilayah Indonesia Tahun 2012-2014. *Journal of International Relations*, 2(4), 39–49. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jih/article/view/13407/12964>
- [6] Braun, V., & Clarke, V. (2006). Applied Qualitative Research in Psychology. *Applied Qualitative Research in Psychology*, 0887(2006). <https://doi.org/10.1057/978-1-137-35913-1>
- [7] Cahyani, F. L., Surayda, H. I., & Setyowati, E. (2023). Penanganan Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(2), 101. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7715>
- [8] Fazli, S. (2022). Narcotics Smuggling in Afghanistan :Links between Afghanistan and Pakistan. *The Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, June, 1–35.
- [9] Gerspacher, N. (2008). The history of international police cooperation: a 150-year evolution in trends and approaches. *Global Crime*, 9(May), 169–184. <https://doi.org/10.1080/17440570701862892>
- [10] Lubis, M. R., Mahzaniar, & Nurhalizah, S. D. (2020). Faktor - Faktor Penghambat Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *UMN Al Washliyah Kerjasama UPMI Dan STOK Bina Guna*, 287–324. <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/550%0Ahttps://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/download/550/544>
- [11] Martin, A., & Si, M. (2021). Reinterpretasi Studi Keamanan dalam Ilmu Hubungan Internasional. *Laporan Penelitian Dan Pengabdian ...*, 47(4), 3. <https://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/download/21/14>
- [12] Memon, H. A., Arain, M. A., Shah, S., & Qadri, N. A. (2024). MOTIVES AND METHODS: A CRIMINOLOGICAL EXAMINATION OF DRUG TRAFFICKING ACROSS PAKISTAN. *Remittances Review*, 6588(September 2023), 1696–1713.
- [13] Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 34. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>
- [14] Prayuda, R., Warsito, T., & Surwandono. (2020). Problems faced by ASEAN in dealing with transnational drug smuggling in Southeast Asia region. *Foresight*, 23(3), 353–366. <https://doi.org/10.1108/FS-12-2019-0106>
- [15] Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- [16] Salehiyan, T., & Padervand, M. (2020). Narco-terrorism in Central Asia, Leading Threats and Measures taken by the Islamic Republic of Iran and Russia to Deal with it. *Central Eurasia Studies*, 13(2), 491–514. <https://doi.org/10.22059/jcep.2020.285900.449854>
- [17] Suhartanto, S. (2023). Strategi Penanganan Kejahatan Transnasional Narkotika di Perbatasan Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(4), 393–406. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i4.2344>
- [18] Tatara, B. A., Suhirwan, S., & Afifuddin,



-
- M. (2023). The economic impact of asymmetric warfare through illicit drug trafficking in Indonesia. *Journal of Enterprise and Development*, 5(1), 88–101. <https://doi.org/10.20414/jed.v5i1.6802>
- [19] Uddin, S. (2020). Pakistani laws on the use of narcotics and drug addiction : Need for Reforms. *Laws on Narcotics: Need for Reforms*, 4(June 2019), 105–123.
- [20] UNODC. (2020). *UNODC Strategy 2021–2025* (Vol. 07057, Issue November 2020).



.....

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN